



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

KECAMATAN WATUKUMPUL
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG



KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

Alamat : Jln Raya Watukumpul No.61 Kode Pos 52357

Website : www.watukumpul.pemalang.go.id

E-mail : kec.watukumpul@desakupemalang.id

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2025. Penyusunan Laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Komitmen, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2025, ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Nama Kecamatan



Watukumpul Kabupaten Pemalang pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pemalang, 01 Desember 2025
Camat Watukumpul
Kabupaten Pemalang



Agus Syarif Nurhadi, S.H
NIP. 19680813 199903 1 005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Capaian sasaran strategis1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”:

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu “Cakupan Layanan Kecamatan” dengan rumus hitung yaitu “Rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase desa bertata kelola pemerintahan baik”.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 Program, yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 sebesar 96,00, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 96,00. Dengan demikian kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 100%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 100% atau tetap.



Terhadap Capaian Kinerja Sebagaimana Tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP;
- Meningkatkan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksana dan pengawasan pembangunan;
- Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
- Meningkatkan penanganan potensi konflik;
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Layanan Urusan Pemerintahan”:

- Diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh” dan “Nilai SAKIP” dengan rumus hitung yaitu “Hasil Survei Kepuasan Masyarakat” dan “Hasil Evaluasi Sakip”.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025:
 - a. Untuk target Indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 sebesar 91,01, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 91,07. Dengan demikian kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 100,07%.
 - b. Untuk target Nilai SAKIP sebesar 68,02, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 68,02. Dengan demikian kinerja



Kecamatan Watukumpul tercapai dengan capaian sebesar 100%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024:
 - a. Untuk capaian target Indeks kepuasan masyarakat tahun yang diperoleh tahun 2024 sebesar 99,63% terjadi kenaikan sebesar 0,43%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 target disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya. Kemudian
 - b. Untuk capaian target Nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 100% dengan memperhatikan capaian realisasi tahun 2024.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP;
2. Meningkatkan kinerja pegawai Kecamatan Watukumpul guna Nilai SAKIP yang maksimal.



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | 1 |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | 3 |
| DAFTAR ISI..... | 6 |
| DAFTAR TABEL..... | 8 |
| DAFTAR GAMBAR..... | 9 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 10 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 10 |
| 1.2 Penjelasan Umum Organisasi..... | 11 |
| 1.2.1 Letak Geografis dan Kondisi Demografis..... | 11 |
| 1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja..... | 13 |
| 1.2.3 Data Rekap ABK ASN PD..... | 14 |
| 1.2.4 Anggaran..... | 16 |
| 1.3 Dasar Hukum..... | 16 |
| 1.4 Sistematika Laporan Kinerja..... | 17 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 19 |
| 2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... | 19 |
| 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025..... | 20 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... | 21 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 30 |
| 3.1 Capaian Kinerja..... | 30 |
| 3.1.1 Skala Capaian Kinerja..... | 31 |
| 3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan..... | 31 |
| 3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir..... | 33 |
| 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi..... | 34 |
| 3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan | |



| | |
|---|----|
| standar nasional (jika ada)..... | 36 |
| 3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan..... | 37 |
| 3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya..... | 38 |
| 3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja..... | 41 |
| 3.2 Realisasi Anggaran..... | 53 |
| BAB IV PENUTUP..... | 58 |
| LAMPIRAN..... | 61 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Data Penduduk Kec.Watukumpul Tahun 2025..... | 12 |
| Tabel 1.2 | Rekapitulasi ASN Kec.Watukumpul..... | 14 |
| Tabel 1.3 | Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025..... | 16 |
| Tabel 2.1 | Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis..... | 19 |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025..... | 19 |
| Tabel 2.3 | Rencana Kinerja Tahun 2025..... | 21 |
| Tabel 2.4 | Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perangkat Daerah..... | 21 |
| Tabel 2.5 | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025..... | 22 |
| Tabel 2.6 | Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2025..... | 29 |
| Tabel 3.1 | Pengkategorian Capaian Kinerja..... | 31 |
| Tabel 3.2 | Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... | 31 |
| Tabel 3.3 | Perbandingan Capaian Kinerja..... | 33 |
| Tabel 3.4 | Kemajuan Capaian Sasaran Strategis..... | 34 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Lain di Kabupaten Pematang..... | 36 |
| Tabel 3.6 | Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi..... | 38 |
| Tabel 3.7 | Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran..... | 39 |
| Tabel 3.8 | Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan..... | 41 |
| Tabel 3.9 | Capaian Anggaran Program dan Kegiatan..... | 53 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kec.Watukumpul..... | 14 |
|---|----|



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Kecamatan Watukumpul Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang Jaya:

1.2.1 Letak Geografis dan Kondisi Demografis

Kecamatan Watukumpul Watukumpul terletak antara 109°21'31 – 109°32'19 Bujur Timur dan antara 7°05'59 – 7°15'10 Lintang Selatan dengan luas wilayah 129,02 Km². Kondisi alam di daerah Kecamatan Watukumpul adalah perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian wilayah 559 meter dpl.

Secara administratif Kecamatan Watukumpul berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Kec.Randudongkal, Kec. Bantarbolang, dan Kec.Bodeh
- Sebelah Timur : Kab. Pekalongan
- Sebelah Selatan : Kab. Purbalingga
- Sebelah Barat : Kec.Belik

Kecamatan Watukumpul terdiri dari 15 Desa. Jumlah penduduk Kecamatan Watukumpul menurut Laporan Monografi Bulan September mencapai 78.683 jiwa yang terdiri dari laki-laki

39.911 jiwa dan Perempuan 38.772 jiwa. Adapun persebaran penduduk menurut wilayah desa sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Penduduk Kecamatan Watukumpul Tahun 2025

| No | Desa | Jumlah Penduduk | | |
|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | L | P | Total |
| 1. | Tundagan | 3.765 | 3.652 | 7.417 |
| 2. | Tlagasana | 5.465 | 5.422 | 10.887 |
| 3. | Bongas | 3.476 | 3.584 | 7.060 |
| 4. | Cikadu | 4.330 | 4.035 | 8.365 |
| 5. | Cawet | 1.767 | 1.782 | 3.549 |
| 6. | Medayu | 1.069 | 1.065 | 2.134 |
| 7. | Pagelaran | 1.064 | 1.041 | 2.105 |
| 8. | Bodas | 1.863 | 1.888 | 3.751 |
| 9. | Jojogan | 2.141 | 2.110 | 4.251 |
| 10. | Majalangu | 4.767 | 4.348 | 9.115 |
| 11. | Tambi | 1.260 | 1.173 | 2.433 |
| 12. | Watukumpul | 2.708 | 2.535 | 5.243 |
| 13. | Gapura | 1.880 | 1.782 | 3.662 |
| 14. | Wisnu | 1.648 | 1.576 | 3.224 |
| 15. | Majakerta | 2.708 | 2.779 | 5.487 |
| Jumlah | | 39.911 | 38.772 | 78.683 |

Sumber: *Monografi Kec. Watukumpul Tahun 2025*

Distribusi penduduk berdasarkan tabel diatas memperlihatkan Desa Tlagasana adalah yang paling banyak penduduknya yaitu sebesar 10.887 jiwa (13,84% dari total jumlah penduduk Kecamatan Watukumpul), sedangkan yang berpenduduk paling kecil adalah Desa Pagelaran, yaitu sebesar 2.105 jiwa (2,67% dari total jumlah penduduk Kecamatan Watukumpul).

1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang mempunyai tugas:

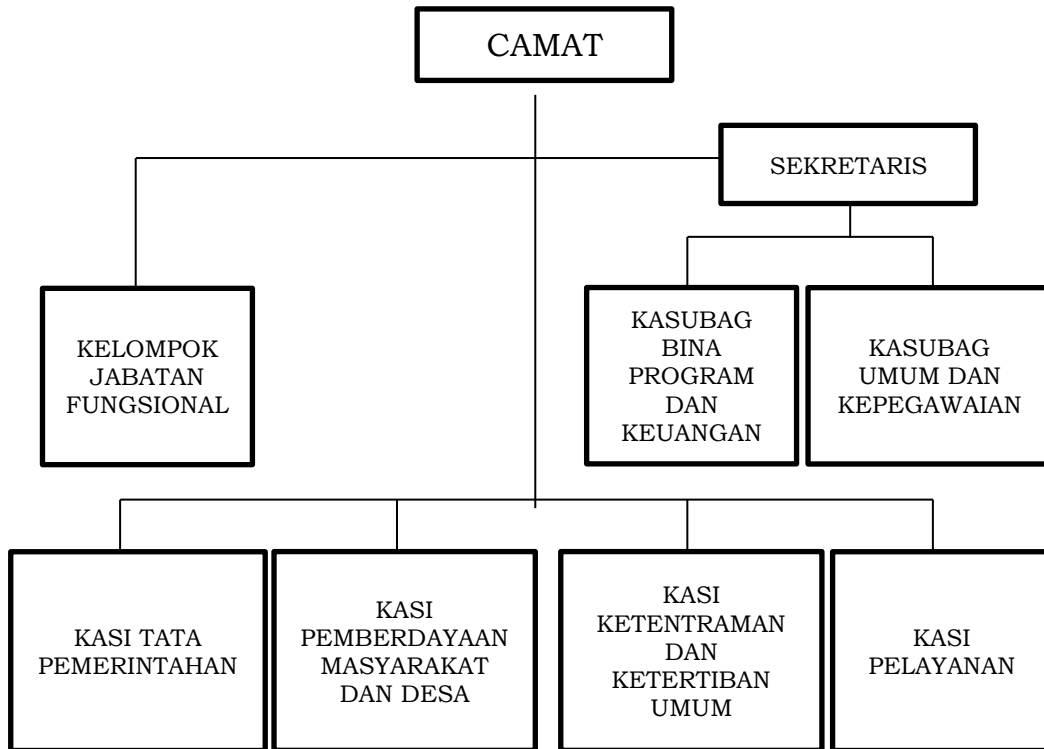
- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada diwilayahnya.
- b. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pengoordinasian Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perbup;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Watukumpul



Sumber : Perbup Kab. Pemalang No 72 Tahun 2016

1.2.3 Data Rekap ABK ASN Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Watukumpul didukung oleh personal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rekapitulasi ASN Kec.Watukumpul

| NO | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | BEZETING | PENDIDIKAN | STATUS KEPEGAWAIAN | L/P |
|----|--------------|---------------|----------|------------|--------------------|-----|
| A. | Camat | 12 | 1 | S-1 | PNS | L |
| 1. | Sekretaris | 11 | 1 | S-1 | PNS | L |

| NO | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | BEZETING | PENDIDIKAN | STATUS KEPEGAWAIAN | L/P |
|----|---|---------------|----------|------------|-------------------------|----------------|
| a. | Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan | 9 | 1 | S-1 | PNS | L |
| | - Penelaah Teknis Kebijakan | 7 | 1 | SMA | PNS | L |
| | - Pengadministrasi Perkantoran | - | 1 | SMA | PPPK | P |
| b. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 8 | 1 | S-1 | PNS | L |
| | - Penata Layanan Operasional | - | 4 | S-1 | PPPK : 2 PPPK PW : 2 | L : 1 P : 3 |
| | - Pengadministrasi Perkantoran | 5 | 1 | SMA | PNS | L |
| | - Operator Layanan Operasional | - | 4 | SMA | PPPK PW | L : 2 P : 2 |
| | - Pengelola Umum Operasional | 2 1 | 2 | SMP | PNS | L |
| 2. | Kepala Seksi | | | | | |
| a. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 9 | 1 | S-1 | PNS | L |
| | - Penata Kelola Pemerintahan | 7 | 1 | S-1 | PNS | L |
| b. | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | 9 | 1 | S-1 | PNS | L |
| | - Penata Kelola Pemerintahan | 7 | 1 | S-1 | PNS | P |
| c. | Kepala Seksi Pelayanan | 9 | 1 | S-1 | PNS | P |
| | - Pengolah Layanan Operasional | 6 | 1 | S-1 | PNS | L |
| d. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 9 | 1 | S-1 | PNS | L |
| | - Penata Kelola Pemerintahan | 7 | 1 | S-1 | PNS | L |

Sumber: Data ASN Kec. Watukumpul Tahun 2026

1.2.4 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang:

Tabel 1.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

| Sumber | Tahun | Jumlah |
|---------------------------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| APBD | Tahun 2024 | Rp 2.942.496.000 |
| APBD | Tahun 2025 | Rp 2.690.452.000 |
| Sumber Lainnya (Jika Ada) | | Rp - |

Sumber : APBD Kab. Pemalang Tahun 2024 dan 2025

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pemalang;
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan Kec.Watukumpul Tahun 2025
- 2 Surat Rekomendasi dari Bagian Organisasi
- 3 LHE AKIP Tahun 2025 Kec.Watukumpul dan Tindak Lanjutnya
- 4 Matriks Renstra Kec.Watukumpul Tahun 2021-2026
- 5 Matriks Renja Kec.Watukumpul Tahun 2025
- 6 Prestasi Kec. Watukumpul
- 7 SK Tim Penyusun LKjIP Kec.Watukumpul Tahun 2025
- 8 Pohon Kinerja Kec.Watukumpul Tahun 2025
- 9 Cascading Kec.Watukumpul Tahun 2025
- 10 Rencana Aksi SAKIP Kec.Watukumpul Tahun 2025

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 2021-2026 Perangkat Daerah

Tujuan dari Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang adalah Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja Pada Tahun | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|---|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima | | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| | | Meningkatnya pelayanan kecamatan | Cakupan layanan kecamatan | 93,33 | 94,67 | 94,67 | 96,00 | 96,00 | 97,33 |

Sumber : Renstra Kecamatan Watukumpul Periode 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Watukumpul adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Penjelasan | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|--------|---|---|------------------------------------|
| | | | | | Definisi Operasional | Formulasi/ Rumus Perhitungan | Sumber Data |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | 1.1 | Cakupan layanan kecamatan | % | Rerata dari persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan | (Persentase pelayanan publik yang tersedia +Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif + | Data Sektoral Kecamatan Watukumpul |

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Penjelasan | | |
|-----|---|----------------------|---|--------|---|---|------------------------------------|
| | | | | | Definisi Operasional | Formulasi/ Rumus Perhitungan | Sumber Data |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | yang aktif, persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | Persentase gangguan trantibum tingkat Desa dan Kecamatan yang dapat diselesaikan + Persentase potensi konflik Tingkat Desa dan Kecamatan yang tertangani + Persentase Desa bertata Kelola pemerintahan baik) / 5 | |
| 2. | Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan | 2.1 | Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh | Indeks | Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan | Hasil survei kepuasan masyarakat | Data Sektoral Kecamatan Watukumpul |
| | | 2.2 | Nilai SAKIP | Nilai | Evaluasi oleh Inspektorat | Hasil SAKIP dari Inspektorat | LHE AKIP dari Inspektorat |

Sumber: *Perbup Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Perbup Nomor 83 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025*

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang Tahun 2025:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|----------------------------------|---|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima | | Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan | Indeks | 90,00 |
| 2. | | Meningkatnya pelayanan kecamatan | Cakupan layanan kecamatan | % | 96,00 |

Sumber : Rencana Kerja Kec. Watukumpul tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2025

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | Cakupan layanan kecamatan | 96,00 % |
| 2 | Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan | Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh | 91,05 |
| | | Nilai SAKIP | 63,86 |

Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2025

| Program | Anggaran |
|--|-------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 2.556.950.000 |
| 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 42.900.000 |
| 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 67.093.500 |
| 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 30.000.000 |
| 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 55.000.000 |
| 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. 146.324.500 |

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang:

Tabel 2.5 Program Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2025

| No. | Sasaran Startegis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Anggaran |
|------------|--|--|---------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan | Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh | 91,05 | |
| | | Nilai SAKIP | 63,86 | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | Cakupan layanan kecamatan | 96,00 % | |
| I | TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG | Nilai SAKIP | 63,86 Indeks | 2.556.950.000 |
| A | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 14 Dokumen | 11.180.000 |

| No. | Sasaran Startegis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Anggaran |
|-----|---|--|----------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 Dokumen | 1.800.000 |
| 2 | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.700.000 |
| 3 | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.280.000 |
| 4 | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.400.000 |
| 5 | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.400.000 |
| 6 | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4 Laporan | 2.100.000 |
| 7 | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 4 Laporan | 1.500.000 |
| B | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun | 15 Laporan | 2.149.268.000 |
| 1 | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 14 Orang/Bulan | 2.148.268.000 |
| 2 | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 Laporan | 1.000.000 |
| C | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun | 2 Laporan | 1.500.000 |
| 1 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | 2 Laporan | 1.500.000 |

| No. | Sasaran Startegis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Anggaran |
|-----|--|--|------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| D | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun | 2 Dokumen | 2.000.000 |
| 1 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | 25 Orang | 2.000.000 |
| E | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | 44 Paket | 90.304.000 |
| 1 | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 5 Paket | 5.800.000 |
| 2 | Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 18 Paket | 27.773.000 |
| 3 | Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 5 Paket | 9.221.000 |
| 4 | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 Laporan | 44.510.000 |
| 5 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 4 Dokumen | 3.000.000 |
| F | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia | 4 Unit | 26.850.000 |
| 1 | Terlaksananya Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | 2 Unit | 7.000.000 |
| 2 | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 2 Unit | 19.850.000 |
| G | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun | 72 Laporan | 202.828.000 |
| 1 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 12 Laporan | 6.000.000 |
| 2 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 36 Laporan | 24.246.000 |
| 3 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 Laporan | 4.000.000 |
| 4 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 Laporan | 168.582.000 |

| No. | Sasaran Startegis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Anggaran |
|-----|--|---|-------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| H | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara | 26 Unit | 73.020.000 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 3 Unit | 47.480.000 |
| 2 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang dipelihara | 10 Unit | 2.500.000 |
| 3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 11 Unit | 7.790.000 |
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 2 Unit | 14.950.000 |
| II | TERLAKSANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pelayanan Publik yang Tersedia | 93,33 % | 42.900.000 |
| A | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun | 3 Dokumen | 10.000.000 |
| 1 | Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 3 Dokumen | 10.000.000 |
| B | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun | 8 Dokumen | 21.000.000 |
| 1 | Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan | 2 Dokumen | 6.000.000 |
| 2 | Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah laporan fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan | 2 Laporan | 10.000.000 |
| 3 | Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | 4 Laporan | 5.000.000 |
| C | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun | 801 Dokumen | 11.900.000 |

| No. | Sasaran Startegis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Anggaran |
|-----|--|---|---------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan | 800 Dokumen | 5.000.000 |
| 2 | Terlaksananya Pelaksanan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan | 1 Laporan | 6.900.000 |
| III | TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Aktif | 100 % | 67.093.500 |
| A | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun | 6 Dokumen | 67.093.500 |
| 1 | Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 8.800.000 |
| 2 | Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | 1 Dokumen | 27.700.000 |
| 3 | Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | 4 Laporan | 30.593.500 |
| IV | TERLAKSANANYA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat di selesaikan | 100 % | 30.000.000 |
| A | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun | 1 Laporan | 18.000.000 |
| 1 | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 18.000.000 |
| B | Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun | 2 Laporan | 12.000.000 |

| No. | Sasaran Startegis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Anggaran |
|-----|--|---|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2 Laporan | 12.000.000 |
| V | TERLAKSANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani | 100 % | 55.000.000 |
| A | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun | 6 Dokumen | 55.000.000 |
| 1 | Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia | 200 Orang | 40.000.000 |
| 2 | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | 30 Orang | 5.000.000 |
| 3 | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan | 3 Dokumen | 10.000.000 |
| VI | TERLAKSANYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | 86,67 % | 146.324.500 |
| A | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun | 128 Dokumen | 146.324.500 |
| 1 | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa | 15 Dokumen | 15.214.500 |

| No. | Sasaran Startegis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Anggaran |
|-----|--|---|------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | dan peraturan kepala desa | | |
| 2 | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa | 15 Dokumen | 15.000.000 |
| 3 | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 15 Dokumen | 35.800.000 |
| 4 | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa | 15 Dokumen | 10.000.000 |
| 5 | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa | 11 Dokumen | 5.000.000 |
| 6 | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa | 15 Dokumen | 10.000.000 |
| 7 | Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | 11 Dokumen | 10.000.000 |
| 8 | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | 15 Dokumen | 20.310.000 |
| 9 | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif | 15 Dokumen | 10.000.000 |
| 10 | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | 1 Dokumen | 15.000.000 |

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Watukumpul Tahun 2025

Pada tanggal 12 bulan September tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran), adanya pergantian pejabat dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | Cakupan layanan kecamatan | 96,00 |
| 2 | Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan | Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh | 91,01 |
| | | Nilai SAKIP | 68,02 |

Sumber: *Perubahan Perjanjian Kinerja Kec. Watukumpul Kab. Pemalang Tahun 2025*

| Program | Anggaran |
|--|-------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 2.431.677.600 |
| 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 35.137.200 |
| 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 54.768.500 |
| 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 24.715.000 |
| 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 47.366.400 |
| 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. 96.787.300 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1 | Sangat Tinggi | $91 \leq 100$ |
| 2 | Tinggi | $76 \leq 90$ |
| 3 | Sedang | $66 \leq 75$ |
| 4 | Rendah | $51 \leq 65$ |
| 5 | Sangat Rendah | ≤ 50 |

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|-----|---|---|--------|-----------|-----------|---------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan | Cakupan layanan Kecamatan | 96,00 | 96,00 | 100 | Sangat Tinggi | Data Sektoral Kecamatan Watukumpul |
| 2 | Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan | Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh | 91,01 | 91,07 | 100,07 | Sangat Tinggi | Hasil Survei Kecamatan Watukumpul Tahun 2025 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|-----|---------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|---------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | urusan Pemerintahan | Nilai SAKIP | 68,02 | 68,02 | 100 | Sangat Tinggi | LHE dari Inspektorat |

Sumber: Laporan Kinerja Kec.Watukumpul TW IV 2025

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Kinerja untuk “Tujuan/Sasaran 1” yang diukur dengan indikator cakupan layanan Kecamatan mencapai 96,00, dengan persentase capaian sebesar 100. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian kinerja ini dapat melampaui target dikarenakan meningkatnya kinerja pegawai Kecamatan Watukumpul dalam menjalankan tupoksinya baik dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, keamanan dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum maupun pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
2. Kinerja untuk “Tujuan/Sasaran 2” yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh mencapai 91,07, dengan persentase capaian sebesar 100,07. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian kinerja ini dapat melampaui target dikarenakan meningkatnya kinerja pegawai kecamatan dalam memberikan pelayanan publik, termasuk dengan meningkatkan sosialisasi standar pelayanan umum Kecamatan Watukumpul kepada Perangkat Desa, maupun melaksanakan publikasi melalui media sosial Kecamatan Watukumpul.
3. Kinerja untuk “Tujuan/Sasaran 2” yang diukur dengan indikator Nilai SAKIP mencapai 68,02, dengan persentase capaian sebesar 100. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini

diklasifikasikan dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian kinerja sangat tinggi terjadi karena adanya komitmen seluruh pegawai Kecamatan Watukumpul dalam meningkatkan kinerjanya.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | | |
|-----|---|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | % Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan | Cakupan layanan Kecamatan | 94,67 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 100 |
| 2. | Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan | Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh | 90,48 | 90,66 | 91,01 | 91,07 | 100,07 |
| | | Nilai SAKIP | 59,05 | 63,76 | 68,02 | 68,02 | 100 |

Sumber: LKjIP Kecamatan Watukumpul Tahun 2023 dan 2024 serta Perjanjian Kinerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Realisasi kinerja "Tujuan/Sasaran 1" mengalami peningkatan dari tahun 2023-2025. Peningkatan kinerja ini terjadi karena meningkatnya kinerja pegawai Kecamatan Watukumpul dalam menjalankan tupoksinya baik dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, keamanan dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, maupun pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2. Realisasi kinerja "Tujuan/Sasaran 2" mengalami peningkatan dari tahun 2023-2025. Peningkatan kinerja ini terjadi karena meningkatnya kinerja pegawai kecamatan dalam memberikan pelayanan publik, termasuk dengan meningkatkan sosialisasi standar pelayanan umum Kecamatan Watukumpul kepada Perangkat Desa, maupun melaksanakan publikasi melalui media sosial Kecamatan Watukumpul.
3. Realisasi kinerja "Tujuan/Sasaran 2" mengalami peningkatan dari tahun 2023-2025. Peningkatan kinerja ini terjadi karena adanya komitmen seluruh pegawai Kecamatan Watukumpul dalam meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian, data ini menunjukkan kinerja Kecamatan Watukumpul mengalami kenaikan terus menerus. Penting untuk terus memantau indikator kinerja yang sudah baik bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja Tahun 2025 | Target Akhir Rencana Strategis | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) =4/5*100 |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan | Cakupan layanan Kecamatan | 96,00 | 97,33 | 98,63% |

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja Tahun 2025 | Target Akhir Rencana Strategis | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) =4/5*100 |
| 2. | Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan | Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh | 91,07 | 92,00 | 98,98% |
| | | Nilai SAKIP | 68,02 | NA | NA |

Sumber: *Capaian Kinerja Kec.Watukumpul Tahun 2025*

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja tahun 2025:

1. Dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Kecamatan tercatat sebesar 96,00. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, Tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 98,63.
2. Realisasi kinerja tahun 2025 dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh tercatat sebesar 91,07. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, Tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 98,98.
3. Realisasi kinerja tahun 2025 dengan indikator kinerja nilai SAKIP tercatat sebesar 68,02. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar NA.

Untuk memastikan pencapaian target jangka menengah tersebut, diperlukan serangkaian strategi yang sistematis dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Meningkatkan kinerja seluruh pegawai Kecamatan
2. Mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah

3. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin
4. Dibuatkan jadwal monitoring dan evaluasi secara mendetail lengkap dengan personil/SDM yang ditugaskan

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Lain di Kabupaten Pemalang

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2025 | Realisasi Perangkat Daerah Lainnya (Kec. Pemalang) |
|-----|---|---|----------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (8) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan | Cakupan layanan Kecamatan | 96,00 | 98,46 |
| 2 | Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan | Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh | 91,07 | 88,53 |
| | | Nilai SAKIP | 68,02 | 68,58 |

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD TW IV 2024 Kecamatan Watukumpul

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja cakupan layanan kecamatan tahun 2025 adalah sebesar 96,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Kecamatan Pemalang yang sebesar 98,46, realisasi kinerja Kecamatan Watukumpul di bawah realisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan capaian realisasi kinerja cakupan layanan kecamatan.

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan tahun 2025 adalah sebesar 91,07. Jika dibandingkan dengan realisasi Kecamatan Pemalang yang sebesar

88,53, realisasi kinerja Kecamatan Watukumpul di atas realisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keunggulan yang dimiliki oleh Kecamatan Watukumpul dalam memberikan pelayanan publik.

Realisasi kinerja Nilai SAKIP tahun 2025 adalah sebesar 68,02. Jika dibandingkan dengan realisasi Kecamatan Pemalang yang sebesar 68,58, realisasi kinerja Kecamatan Watukumpul di bawah realisasi Kecamatan Pemalang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan nilai SAKIP dan komitmen kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk mengatasi ketertinggalan tersebut, diperlukan strategi yang terencana dan terfokus. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Mengoptimalkan kapasitas aparatur secara rutin
2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksana dan pengawasan pembangunan;
4. Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
6. Menyusun rencana aksi tindak lanjut LHE SAKIP atas rekomendasi dari inspektorat.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/Keg agalan | Solusi yang dilakukan |
|-----|---|---|--------|-----------|--------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan | Cakupan layanan Kecamatan | 96,00 | 96,00 | 100 | Adanya komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya; Pemimpin yang proaktif dalam memperbaiki sistem layanan dan sigap menindaklanjuti keluhan Masyarakat. | Meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan peran serta Masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan, meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban, meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa |
| 2. | Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan | Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh | 91,01 | 91,07 | 100,07 | Meningkatkan kualitas layanan melalui prosedur, waktu pelayanan, kompetensi pelaksana dan sarana prasarana yang memadai. | Perbaiki kualitas sarana dan prasarana, penyederhanaan prosedur layanan |
| | | Nilai SAKIP | 68,02 | 68,02 | 100 | Pemenuhan dokumen penunjang SAKIP dan rekomendasi atas LHE SAKIP | Adanya komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya |

Sumber: *Data Sektoral Kecamatan Watukumpul Tahun 2025*

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efisiensi

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi |
|-----|---|-------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | Realisasi | % Capaian | |
| | | | | | (Rp.) | (Rp.) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan | 96,00 | 96,00 | 100 | 258.774.400 | 257.468.280 | 99,50 | 0,50 |
| 2. | Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan | 91,01 | 91,07 | 100,07 | 35.137.200 | 34.960.200 | 99,50 | 0,57 |
| | | 68,02 | 68,02 | 100 | 2.431.677.600 | 2.194.366.857 | 90,24 | 9,76 |

Sumber: *Data Kecamatan Watukumpul 2025*

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diidentifikasi informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis ini merupakan langkah penting untuk menilai tingkat efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Tujuan/Sasaran Kecamatan Watukumpul yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan mencapai efisiensi sebesar 0,50%, yang termasuk dalam kategori Efisien. Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena adanya standar pelayanan kecamatan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, proses kerja yang telah distandarisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan peran serta Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan, meningkatkan keamanan dan ketertiban

umum, serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2. Tujuan/Sasaran Kecamatan Watukumpul Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan:

- a. Dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh mencapai efisiensi sebesar 0,57%, yang termasuk dalam kategori efisien. Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena adanya penerapan standar pelayanan kecamatan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, proses kerja yang telah distandarisasi sesuai dengan SOP yang ada, serta adanya komitmen bersama seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- b. Dengan indikator Nilai SAKIP mencapai efisiensi sebesar 9,76%, yang termasuk dalam kategori Efisien. Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena adanya komitmen bersama seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian % | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang | Analisis |
|-----|---|---------------------------|--------------|---|--|--------------|----------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan | Cakupan layanan Kecamatan | 100 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Pelayanan Publik yang tersedia | 100 | Menunjang | Pelayanan publik yang meningkat akan menunjang cakupan layanan kecamatan dan IKM Kecamatan Watukumpul |
| | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun | 100 | Menunjang | Penyusunan dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang mencerminkan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan di Kecamatan Watukumpul. |
| | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat | Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan | 100 | Menunjang | Kinerja yang melampaui target menunjukkan komitmen Kecamatan Watukumpul dalam menangani urusan pemerintahan dengan optimal. |

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian % | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang | Analisis |
|-----|--------------------|----------------------|--------------|---|--|--------------|----------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | Daerah yang ada di Kecamatan | oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang tersusun | | | |
| | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | 139,32 | Menunjang | Penyusunan laporan yang lengkap menunjukkan keandalan Camat Kecamatan Watukumpul dalam menjalankan tugas yang dilimpahkan. |
| | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif | 100 | Menunjang | Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif dikarenakan adanya bimbingan dan pengawasan Kecamatan Watukumpul |
| | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah laporan koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun | 100 | Menunjang | Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat oleh Kecamatan Watukumpul. |

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian % | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang | Analisis |
|-----|--------------------|----------------------|--------------|---|--|--------------|----------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan | 100 | Menunjang | Terselasainya permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban umum akan meningkatkan cakupan layanan Kecamatan dan IKM Kecamatan Watukumpul |
| | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun | 100 | Menunjang | Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum mendukung keberhasilan Kecamatan Watukumpul dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. |
| | | | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun | 100 | Menunjang | Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mendukung keberhasilan Kecamatan Watukumpul dalam menciptakan |

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian % | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang | Analisis |
|-----|--------------------|----------------------|--------------|---|--|--------------|----------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | lingkungan yang tertib dan aman |
| | | | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani | 100 | Menunjang | Potensi konflik yang tertangani akan meningkatkan cakupan layanan Kecamatan dan IKM Kecamatan Watukumpul |
| | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun | 100 | Menunjang | Terlaksananya urusan pemerintahan umum memastikan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah dapat dijalankan dengan baik oleh Kecamatan Watukumpul |
| | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | 100 | Menunjang | Desa bertata kelola yang baik akan meningkatkan Cakupan layanan Kecamatan dan IKM Kecamatan Watukumpul |
| | | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan | 100 | Menunjang | Capaian yang mendekati target menunjukkan upaya maksimal Kecamatan Watukumpul dalam |

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian % | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang | Analisis |
|-----|---|---|--------------|--|--|--------------|----------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | pengawasan pemerintahan desa yang tersusun | | | memberikan pembinaan dan pengawasan desa. |
| 2. | Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan | Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh | 99,63 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; | 100 | Menunjang | Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan komitmen kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya |
| | | Nilai SAKIP | 100 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 100 | Menunjang | Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang mencapai target menunjukkan koordinasi dan perencanaan yang efektif di Kecamatan Watukumpul, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program. |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun | 100 | Menunjang | Tersusunnya seluruh dokumen administrasi keuangan dengan baik mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan |

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian % | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang | Analisis |
|-----|--------------------|----------------------|--------------|--|---|--------------|----------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | dan akuntabel di Kecamatan Watukumpul. |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun | 100 | Menunjang | Ketersediaan kebutuhan laporan administrasi barang meningkatkan kualitas layanan publik dengan memastikan ketersediaan aset yang diperlukan dan dapat mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset daerah. |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun | 100 | Menunjang | Keterlibatan penuh pegawai dalam program peningkatan kapasitas menunjukkan komitmen Kecamatan Watukumpul untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | 100 | Menunjang | Ketersediaan kebutuhan dokumen administrasi umum mendukung efisiensi dan efektivitas operasional |

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian % | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang | Analisis |
|-----|--------------------|----------------------|--------------|---|---|--------------|----------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | Kecamatan Watukumpul dalam menjalankan fungsinya. |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia | 100 | Menunjang | Penyediaan barang milik daerah yang mencapai target mendukung kelancaran kegiatan operasional dan pelayanan Kecamatan Watukumpul |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun | 100 | Menunjang | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan menunjukkan kesiapan Kecamatan Watukumpul dalam mendukung kebutuhan operasional dan pelayanan Kecamatan Watukumpul. |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara | 128,57 | Menunjang | Pemeliharaan yang optimal memastikan keberlanjutan penggunaan barang milik daerah untuk mendukung operasional Kecamatan Watukumpul. |

Sumber: *Data Kecamatan Watukumpul*

Uraian penjelasan tabel:

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Berikut ini disajikan analisis mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan karena adanya standar pelayanan Kecamatan Watukumpul dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui Sosialisasi maupun bimbingan teknis tentang standar pelayanan.
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan memiliki realisasi 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena terciptanya sinergi yang baik antar pemangku kepentingan di Kecamatan Watukumpul.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat memiliki realisasi 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena adanya komitmen Kecamatan Watukumpul dalam menangani urusan pemerintahan dengan optimal.
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat memiliki realisasi 139,32%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena

menunjukkan keandalan Camat Kecamatan Watukumpul dalam menjalankan tugas yang dilimpahkan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan adanya peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kelurahan memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat oleh Kecamatan Watukumpul.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan karena adanya koordinasi yang baik antara Kecamatan Watukumpul dan dinas/instansi terkait dalam menangani permasalahan pengaduan maupun masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
 - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan karena terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum mendukung keberhasilan Kecamatan Watukumpul dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.

- b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan karena terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mendukung keberhasilan Kecamatan Watukumpul dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan karena adanya koordinasi yang baik antara Kecamatan Watukumpul dengan Forkompincam, Dinas/Instansi tingkat Kecamatan maupun dengan pemerintahan Desa terkait dengan pemerintahan umum.
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan karena terlaksananya urusan pemerintahan umum memastikan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah dapat dijalankan dengan baik oleh Kecamatan Watukumpul.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan karena adanya peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga Desa bisa mengelola tata pemerintahan yang baik dan tertib administrasi.
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan karena capaian yang mendekati target menunjukkan upaya maksimal Kecamatan Watukumpul dalam memberikan pembinaan dan pengawasan desa.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan karena adanya komitmen bersama seluruh pegawai di Kecamatan Watukumpul dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan koordinasi dan perencanaan yang efektif di Kecamatan Watukumpul, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di Kecamatan Watukumpul.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut meningkatkan kualitas layanan publik dengan memastikan ketersediaan aset yang diperlukan dan dapat mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan asset daerah.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen Kecamatan Watukumpul untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut mendukung efisiensi dan efektivitas operasional Kecamatan Watukumpul dalam menjalankan fungsinya.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut mendukung kelancaran kegiatan operasional dan pelayanan Kecamatan Watukumpul.

- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki realisasi kinerja sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan kesiapan Kecamatan Watukumpul dalam mendukung kebutuhan operasional dan pelayanan Kecamatan Watukumpul.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki realisasi kinerja sebesar 128,57%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut mendukung operasional Kecamatan Watukumpul.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|-----|--|---------------|----------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.431.677.600 | 2.194.366.857 | 90,24 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.258.400 | 12.060.400 | 98,38 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.931.789.000 | 1.707.645.650 | 88,40 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1.000.000 | 956.000 | 95,60 |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 52.001.600 | 51.989.000 | 99,98 |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 81.944.400 | 81.643.787 | 99,63 |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 26.850.000 | 26.850.000 | 100 |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 201.394.200 | 189.054.261 | 93,87 |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 124.440.000 | 124.167.759 | 99,78 |
| B | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 35.137.200 | 34.960.200 | 99,50 |
| 1 | Koordinasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 7.561.400 | 7.516.400 | 99,40 |
| 2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 15.675.800 | 15.586.800 | 99,43 |
| 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 11.900.000 | 11.857.000 | 99,64 |
| C | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 54.768.500 | 54.600.780 | 99,69 |
| 1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 54.768.500 | 54.600.780 | 99,69 |
| D | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 24.715.000 | 24.556.000 | 99,36 |
| 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan | 17.525.000 | 17.367.000 | 99,10 |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|-----|---|---------------|----------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | |
| 2 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 7.190.000 | 7.189.000 | 99,99 |
| E | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 47.366.400 | 46.820.900 | 98,85 |
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 47.366.400 | 46.820.900 | 98,85 |
| F | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 98.787.300 | 96.530.400 | 99,73 |
| 1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 98.787.300 | 96.530.400 | 99,73 |

Sumber: *Data Kecamatan Watukumpul Tahun 2025*

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat realisasi dan serapan anggaran dari masing-masing program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut ini adalah analisis terhadap data tersebut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 90,24%. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi. Hal ini disebabkan oleh tingginya persentase serapan anggaran yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program karena anggaran yang tidak terserap karena ada pegawai yang pensiun dan efisiensi dalam pemeliharaan kendaraan dinas.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 99,50%. Capaian

ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi. Hal ini disebabkan oleh tingginya persentase serapan anggaran yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program karena anggaran yang tidak terserap karena adanya efisiensi pemakaian perjalanan dinas, belanja rapat makan dan minum.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 99,69%. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi. Hal ini disebabkan oleh tingginya persentase serapan anggaran yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program guna meningkatkan pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 99,36%. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi. Hal ini disebabkan oleh tingginya persentase serapan anggaran yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program sehingga semua pengaduan yang masuk bisa tertangani dengan cepat.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 98,85%. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi. Hal ini disebabkan oleh tingginya persentase serapan anggaran yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program dengan adanya koordinasi yang baik antara Kecamatan Watukumpul, Forkopincam dan pemerintahan Desa.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 99,73%. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi. Hal ini disebabkan oleh tingginya persentase

serapan anggaran yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam mengelola tata pemerintahan yang baik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kecamatan Watukumpul memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu sebagai berikut:
 - a. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator kinerja cakupan layanan kecamatan realisasi sebesar 96,00. Ketika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 96,00 maka capaian kinerjanya tercapai, hal ini terwujud karena meningkatnya kinerja pegawai Kecamatan Watukumpul dalam menjalankan tupoksinya baik dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, keamanan dan ketertiban

umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum maupun pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

b. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Layanan Urusan Pemerintahan mempunyai 2 indikator yaitu:

1) Indikator kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh sebesar 91,07. Ketika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 91,00, maka capaian kinerjanya tercapai sangat tinggi. Hal ini dapat terwujud karena meningkatnya kinerja pegawai kecamatan dalam memberikan pelayanan publik, termasuk dengan meningkatkan sosialisasi standar pelayanan umum Kecamatan Watukumpul kepada Perangkat Desa, maupun melaksanakan publikasi melalui media sosial Kecamatan Watukumpul.

2) Indikator kinerja nilai SAKIP Tahun 2025 sebesar 68,02. Ketika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 63,76 maka capaian kinerjanya tercapai. Capaian kinerja ini bisa tercapai karena adanya komitmen seluruh pegawai Kecamatan Watukumpul dalam meningkatkan kinerjanya.

2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Kecamatan Watukumpul adalah sebagai berikut:

- a) Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Manusia
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada
- c) Belum optimalnya penyediaan data perencanaan Pembangunan untuk masing-masing urusan
- d) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencana pada tahun berikutnya
- e) Belum optimalnya koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal sehingga masih ditemukan kegiatan yang kurang sinergis.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Watukumpul adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas aparatur secara rutin.
2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah.
4. Dibuatkan jadwal monitoring dan evaluasi secara mendetail lengkap dengan SDM yang ditugaskan guna perencanaan pada tahun berikutnya dapat berjalan dengan baik.
5. Mengoptimalkan koordinasi dengan pegawai/SDM baik secara vertikal maupun horizontal guna kegiatan yang kurang strategis dapat diselesaikan dengan baik

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stake holder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pemalang.



31 Desember 2025
Camat Watukumpul
Kabupaten Pemalang
AGUS SYARIF NURHADI, S.H
Pembina Tk.I
NIP. 19680813 199903 1 005

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN WATUKUMPUL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS SYARIF NURHADI, S.H.**
Jabatan : **CAMAT WATUKUMPUL**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MANSUR HIDAYAT**
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 14 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

MANSUR HIDAYAT

Pihak Pertama,
CAMAT WATUKUMPUL

AGUS SYARIF NURHADI, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG**

| NO | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | TW.1 | TW.2 | TW.3 | TW.4 |
|----|---|---|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan | Cakupan layanan Kecamatan | % | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 2. | Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan | Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh | Indeks | 91,05 | - | 91,05 | - | 91,05 |
| | | Nilai SAKIP | Nilai | 63,86 | - | - | 63,86 | - |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (RP.) | KETERANGAN |
|---------------|---|----------------------|------------|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.556.950.000 | DAU |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 42.900.000 | DAU |
| 3. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 67.093.500 | DAU |
| 4. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 30.000.000 | DAU |
| 5. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 55.000.000 | DAU |
| 6. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 146.324.500 | DAU |
| JUMLAH | | 2.898.268.000 | |

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG



MANSUR HIDAYAT

Pemalang, 14 Januari 2025
Pihak Pertama,
CAMAT WATUKUMPUL



AGUS SYARIF NURHADI, S.H.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL

Jalan Raya Watukumpul Nomor 61, Pemalang, Jawa Tengah Kode Pos 52357,
Laman : www.watukumpul.pemalangkab.go.id
Pos el : kec.watukumpul12@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS SYARIF NURHADI, S.H**
Jabatan : **CAMAT WATUKUMPUL**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANOM WIDIYANTORO**
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 21 April 2025

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

ANOM WIDIYANTORO

Pihak Pertama,
CAMAT WATUKUMPUL


AGUS SYARIF NURHADI, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG**

| NO | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | TW.1 | TW.2 | TW.3 | TW.4 |
|----|---|---|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan | Cakupan layanan Kecamatan | % | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 2. | Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan | Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh | Indeks | 91,05 | - | 91,05 | - | 91,05 |
| | | Nilai SAKIP | Nilai | 63,86 | - | - | 63,86 | - |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (RP.) | KETERANGAN |
|---------------|---|----------------------|------------|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.544.156.600 | DAU |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 28.137.200 | DAU |
| 3. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 54.768.500 | DAU |
| 4. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 17.715.000 | DAU |
| 5. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 37.366.400 | DAU |
| 6. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 76.787.300 | DAU |
| JUMLAH | | 2.758.931.000 | |

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG



ANOM WIDIYANTORO

Pemalang, 21 April 2025
Pihak Pertama,
CAMAT WATUKUMPUL



AGUS SYARIF NURHADI, S.H.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL

Jalan Raya Watukumpul Nomor 61, Pemalang, Jawa Tengah Kode Pos 52357,
Laman : www.watukumpul.pemalangkab.go.id
Pos el : kec.watukumpul12@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS SYARIF NURHADI, S.H**
Jabatan : **CAMAT WATUKUMPUL**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANOM WIDIYANTORO**
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 22 September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG


ANOM WIDIYANTORO

Pihak Pertama,
CAMAT WATUKUMPUL


AGUS SYARIF NURHADI, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG**

| NO | TUJUAN DAN SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | TW.1 | TW.2 | TW.3 | TW.4 |
|----|---|---|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan | Cakupan layanan Kecamatan | % | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 2. | Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan | Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh | Indeks | 91,01 | - | 91,01 | - | 91,01 |
| | | Nilai SAKIP | Nilai | 68,02 | - | 68,02 | - | - |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (RP.) | KETERANGAN |
|---------------|---|----------------------|------------|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.431.677.600 | DAU |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 35.137.200 | DAU |
| 3. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 54.768.500 | DAU |
| 4. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 24.715.000 | DAU |
| 5. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 47.366.400 | DAU |
| 6. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 96.787.300 | DAU |
| JUMLAH | | 2.690.452.000 | |

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG


ANOM WIDIYANTORO

Pemalang, 22 September 2025
Pihak Pertama,
CAMAT WATUKUMPUL


AGUS SYARIF NURHADI, S.H.

Lampiran 2 Surat Rekomendasi dari Bagian Organisasi



KABUPATEN PEMALANG

Pemalang, 16 Maret 2026

Nomor : 000.8/72/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Rekomendasi atas LKJIP
Tahun 2025

Yth. Camat Watukumpul

di –

Pemalang

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan reviu atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Untuk selanjutnya, kami sampaikan rekomendasi atas penyempurnaan dokumen LKJIP Kecamatan Watukumpul Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Font disesuaikan dengan template dari Bagian Organisasi;
2. Ikhtisar eksekutif diperiksa dan disesuaikan kembali dengan nilai yang tercantum pada Bab II sampai dengan Bab IV;
3. Daftar isi dan daftar tabel disesuaikan kembali penomoran halaman;
4. Dasar hukum tambahkan Perbup Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pemalang dan IKU Perangkat Daerah;
5. Angka 1.4 pada Bab 1 untuk lampiran di tambahkan Renstra, Renja, Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Aksi SAKIP, Surat Rekomendasi dari Bagian Organisasi, LHE SAKIP dan Tindak Lanjut LHE Sakip Tahun 2025;
6. Tabel 3.4 Nilai SAKIP pada kolom Target Akhir Rencana Strategis dan Tingkat Kemajuan diberi keterangan NA;
7. Sesuaikan penulisan judul pada tabel 3.5;
8. Alasan penyebab dan solusi cukup dimasukkan ke dalam tabel analisis keberhasilan/kegagalan dan solusi;
9. Analisis keberhasilan/kegagalan terhadap indikator kinerja sebutkan secara spesifik dan bersifat teknis penyebab yang ada, jangan hanya secara general;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Lampiran disesuaikan dengan isi lampiran pada sistematika laporan kinerja.

Hasil perbaikan atas dokumen LKJIP sebagaimana tersebut di atas disertai dengan tindak lanjut atas evaluasi SAKIP Tahun 2025 dari Inspektorat Kabupaten Pemalang dikirimkan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Pemalang dalam bentuk *softcopy* format PDF dan telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Srikandi (<http://srikandi.arsip.go.id>) serta tembusan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang c.q. Kepala Bagian Organisasi, dalam format word dikirimkan paling lambat Hari Selasa, 17 Maret 2025 melalui link <https://bit.ly/4bnrZ7I>

Demikian hasil rekomendasi atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI PEMALANG
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



BAGUS SUTOPO, S.STP., M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 197907111997111001

Tembusan:

1. Bupati Pemalang;
2. Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Setda Kabupaten Pemalang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 3 LHE AKIP Tahun 2024 dan Tindak Lanjutnya



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG INSPEKTORAT

Jalan Pemuda Nomor 44, Mulyoharjo, Pemalang Jawa Tengah 52313
Telepon /Faksimile (0284) 321254, Fax (0284) 322339
Laman www.Inspektorat.pemalangkab.go.id

Pemalang, 8 Mei 2025

Nomor : 700.1.2.1/0444/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2024

Yth. Bupati Pemalang

di-

PEMALANG

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- g) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- h) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 100.3.3.2/699/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
- i) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor : 700.1.2.7/0322/2025 Tanggal 8 April 2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan secara "*self assesment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self-assesment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Bupati Pemalang selaku Kepala Daerah Kabupaten Pemalang perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di

bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 - 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 - 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 - 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 - 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP
 - 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Checklist pengumpulan data dan informasi
- b) Komunikasi melalui tanya jawab sederhana
- c) Observasi
- d) Studi dokumentasi

1.6. Susunan Tim

| No. | Jabatan Dalam Tim | : | Nama |
|-----|-----------------------|---|-------------------------|
| 1. | Wakil Penanggungjawab | | ZAINI DWI HANDOKO, S.IP |
| 2. | Ketua Tim | | ADJI NUSWANTORO, S.Hut |
| 3. | Anggota | | GUNAWAN W., S.Si, M.Si |
| 4. | Anggota | | SRI PANGASTUTI, SE |

1.7. Gambaran Umum Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

a) Dasar Hukum Pembentukan

Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dibentuk melalui:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

b) Kedudukan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c) Tugas dan Fungsi

Kecamatan Watukumpul mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ada di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian upaya penyelenggaraan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah;
9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah harus dilakukan. Oleh karena itu, Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan

strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi ke 2 Bupati yaitu: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan misi ke - 4: Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan, Kecamatan Watukumpul telah menetapkan sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Watukumpul beserta target serta realisasi dan capaiannya dijelaskan pada tabel berikut:

| No. | Indikator | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan | 91 | 90,66 | 99,63 |
| 2. | Cakupan Layanan Kecamatan | 96 | 96 | 100 |
| 3. | Nilai SAKIP | 63,76 | 63,76 | 100 |
| | Rata-rata | | | 99,88 |

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar 99,88% termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 4 (empat) rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti.

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|----|--|---------------|
| 1 | Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (<i>benchmark kinerja</i>) pada laporan kinerja. | Telah sesuai |
| 2 | Membuat peraturan yang menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai variabel indikator dalam pengusulan penempatan / penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional. | Telah sesuai |
| 3 | Membuat kebijakan <i>reward and punishment</i> pada dinas atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga dapat mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah. | Telah sesuai |
| 4 | Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk seluruh kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun berjalan. | Telah sesuai |

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 mendapatkan Nilai 68,02 kategori **BAIK** dengan Predikat "**B**". Adapun rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

| Komponen | Bobot | Bobot Sub Komponen | | | Total Nilai |
|---|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Keberadaan | Kualitas | Pemanfaatan | |
| Perencanaan Kinerja | 30 | 4,20 | 6,30 | 10,50 | 21,00 |
| Pengukuran Kinerja | 30 | 4,20 | 6,17 | 10,20 | 20,57 |
| Pelaporan Kinerja | 15 | 2,10 | 2,85 | 4,5 | 9,45 |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 3,50 | 5,25 | 8,25 | 17,00 |
| Total Nilai | 100 | 14,00 | 20,57 | 33,45 | 68,02 |

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya (2023) mengalami **kenaikan** sebesar 4,26 yaitu dari

63,76 menjadi 68,02 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2.1. Hasil Evaluasi

a) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian perencanaan kinerja sebagai berikut :

a. Sub Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen keberadaan perencanaan kinerja diketahui bahwa Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah melakukan pemenuhan dokumen sub komponen keberadaan perencanaan kinerja sebanyak 6 (enam) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang dipersyaratkan. Dokumen Perencanaan kinerja yang sudah tersedia namun ada beberapa dokumen yang belum lengkap antara lain:

- Dokumen IKU yang telah disahkan tidak terdapat definisi operasional atas kinerja yaitu penjelasan spesifik dan terperinci cara pengukurannya.
- Dokumen pohon kinerja dan cascading sudah dibuat belum ditandatangani oleh camat.

b. Sub Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen kualitas/mutu perencanaan kinerja diketahui bahwa Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah memenuhi 11 (sebelas) kriteria dari 11 (sebelas) kriteria yang dipersyaratkan. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART.

c. Sub Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen pemanfaatan perencanaan kinerja diketahui bahwa Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang dipersyaratkan. Perencanaan kinerja sudah maksimal dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan namun ada beberapa capaian kinerja.

b) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian komponen pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sub Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen keberadaan pengukuran kinerja diketahui bahwa Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah melakukan pemenuhan dokumen Sub Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja sebanyak 3 (tiga) kriteria dari 3 (tiga) kriteria yang dipersyaratkan. Pengukuran kinerja telah dilakukan yaitu: tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.

2) Sub Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen kualitas/mutu pengukuran kinerja diketahui bahwa Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang dipersyaratkan.

Pengukuran Kinerja telah mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, namun **belum** memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi esakit.pemalangkab.go.id)

3) Sub Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja diketahui bahwa Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah memenuhi 10 (sepuluh) kriteria dari 10 (sepuluh) kriteria yang dipersyaratkan. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Seluruh hasil pengukuran kinerja (individu dan organisasi) telah dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

c) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian komponen pelaporan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen keberadaan pelaporan kinerja diketahui bahwa Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah melakukan pemenuhan dokumen sub komponen keberadaan pelaporan kinerja sebanyak 6 (enam) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang dipersyaratkan. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja. Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala telah disampaikan tepat waktu dan telah dipublikasikan di website <https://watukumpul.pemalangkab.go.id> dan aplikasi esr-menpan.

2) Sub Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen kualitas/mutu pelaporan kinerja diketahui bahwa Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah memenuhi 9 (sembilan) kriteria dari 9 (sembilan) kriteria yang dipersyaratkan. Dokumen pelaporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, juga menjelaskan seluruh capaian dan target kinerja dari indikator kinerja (sasaran, IKU, program, kegiatan dan sub kegiatan)

3) Sub Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen pemanfaatan pelaporan kinerja diketahui bahwa Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang dipersyaratkan. Pelaporan kinerja memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Capai kinerja telah memenuhi target.

d) Sub Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi sub komponen keberadaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui bahwa Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah melakukan pemenuhan dokumen sub komponen keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebanyak 6 (enam) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang dipersyaratkan. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan yaitu terdapat Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, laporan hasil evaluasi SAKIP nomor 700/196/EVS/N/2024 tanggal 13 Juni 2024.

2) Sub Komponen Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi sub komponen kualitas/mutu evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui bahwa Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah memenuhi 9 (sembilan) kriteria dari 9 (sembilan) kriteria yang dipersyaratkan. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Evaluator telah mendapatkan pelatihan evaluasi SAKIP dan evaluatan telah mengikuti pelatihan penyusunan laporan kinerja. Rekomendasi hasil evaluasi AKIP telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait.

3) Sub Komponen Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi sub komponen pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui bahwa Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang dipersyaratkan.

Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Hasil evaluasi akuntabilitas sudah dilengkapi dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), tindak lanjut LHE SAKIP dan laporan AKIP internal yang digunakan untuk peningkatan kinerja.

2.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, evaluator merekomendasikan beberapa perbaikan untuk peningkatan SAKIP sebagai berikut:

1. Mengesahkan dokumen perencanaan (pohon kinerja dan *cascading*) oleh camat.
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja pada aplikasi e-SAKIP untuk melihat perkembangan pencapaian target secara triwulanan apakah masih *on the right track* atau sudah tercapai dengan baik sesuai dengan jalur atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Menyempurnakan dokumen IKU agar dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja secara lebih spesifik.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang memperoleh nilai **68,02** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

| No | Komponen yang Dinilai | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|
| a. | Perencanaan Kinerja | 20,55 | 21,00 |
| b. | Pengukuran Kinerja | 19,26 | 20,57 |
| c. | Pelaporan Kinerja | 9,30 | 9,45 |
| d. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 14,65 | 17,00 |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 63,76 | 68,02 |

3.1.2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 68,02 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori interpretasi "**BAIK**" dengan predikat **B** (bahwa AKIP sudah baik pada unit kerja utama, namun masih perlu banyak perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja).

3.2. Dorongan untuk Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Atas hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, secara umum dalam rangka peningkatan nilai AKIP di waktu yang akan datang, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti semua rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE), dan semua sub komponen;
- b. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi, Bappeda dalam penyusunan LKjIP dan dokumen perencanaan di tahun yang akan datang;
- c. Melakukan tertib administrasi atas data dukung yang digunakan/dipersyaratkan dalam evaluasi AKIP.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP pada Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG



EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 1977106 200501 1 005

Tembusan:

1. Camat Watukumpul Kabupaten Pemalang
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
3. Kasubag PKU pada Inspektorat Kabupaten Pemalang.

**TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKIP
KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN 2024**

| No | Rekomendasi |
|----|---|
| 1. | <p>Rekomendasi 1 Mengesahkan dokumen perencanaan (pohon kinerja dan <i>cascading</i>) oleh camat.</p> <p>Tindak Lanjut: Melakukan pengesahan dokumen perencanaan (pohon kinerja dan <i>cascading</i>) oleh camat Tautan Pohon Kinerja dan <i>Cascading</i>: https://drive.google.com/drive/folders/1jS_LVPiLaYJG_Y3VlktmDOI5t6H8SHOy?usp=drive_link</p> |
| 2. | <p>Rekomendasi 2 Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja pada aplikasi e-SAKIP untuk melihat perkembangan pencapaian target secara triwulanan apakah masih on the right track atau sudah tercapai dengan baik sesuai dengan jalur atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.</p> <p>Tindak Lanjut: Aplikasi e-SAKIP Kabupaten Pemalang (https://e-planning.pemalangkab.go.id/esakip/) masih dalam tahap tidak bisa diakses / <i>maintenance</i> dan belum dapat digunakan, maka sesuai arahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang, penyusunan laporan capaian kinerja triwulan secara manual dan menggantinya di Aplikasi e-SAKIP REVIU Kemenpan (https://esr.menpan.go.id/). Tautan Capaian Kinerja: https://drive.google.com/drive/folders/1jS_LVPiLaYJG_Y3VlktmDOI5t6H8SHOy?usp=drive_link</p> |
| 3. | <p>Rekomendasi 3 Menyempurnakan dokumen IKU agar dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja secara lebih spesifik.</p> <p>Tindak Lanjut: Menyusun perubahan dokumen IKU dengan menambahkan data definisi operasional. Tautan Dokumen IKU: https://drive.google.com/drive/folders/1jS_LVPiLaYJG_Y3VlktmDOI5t6H8SHOy?usp=drive_link</p> |

Pemalang, 28 Oktober 2025

 AGUS SWARIE NURHADI, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680813 199903 1 005

Lampiran 4 Matriks Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke - | | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|---|----------------------------------|---|--------|--------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (12) |
| 1 | Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima | | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan | Indeks | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
| 2 | | Meningkatnya pelayanan kecamatan | Cakupan layanan kecamatan | % | 93,33 | 93,33 | 94,67 | 94,67 | 96,00 | 96,00 | 97,33 | 97,33 |

Lampiran 5 Matriks Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2025

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Target |
|-----|---|----------------------------------|---|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima | | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan | Indeks | 90,00 |
| 2. | | Meningkatnya pelayanan kecamatan | Cakupan layanan kecamatan | % | 96,00 |

Lampiran 6 Prestasi Kec. Watukumpul Tahun 2025



Lampiran 7 SK Tim Penyusun LKjIP Kec.Watukumpul Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN WATUKUMPUL

KEPUTUSAN CAMAT WATUKUMPUL
NOMOR : 900.1.15/ 74 / TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025
PADA KECAMATAN WATUKUMPUL

CAMAT WATUKUMPUL,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 maka dipandang perlu Menyusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Watukumpul Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Watukumpul tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Watukumpul.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT WATUKUMPUL TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025 PADA KECAMATAN WATUKUMPUL;
- KESATU** : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Watukumpul;
- KEDUA** : Tugas Tim adalah melakukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Watukumpul;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Watukumpul
Pada tanggal : 31 Desember 2025



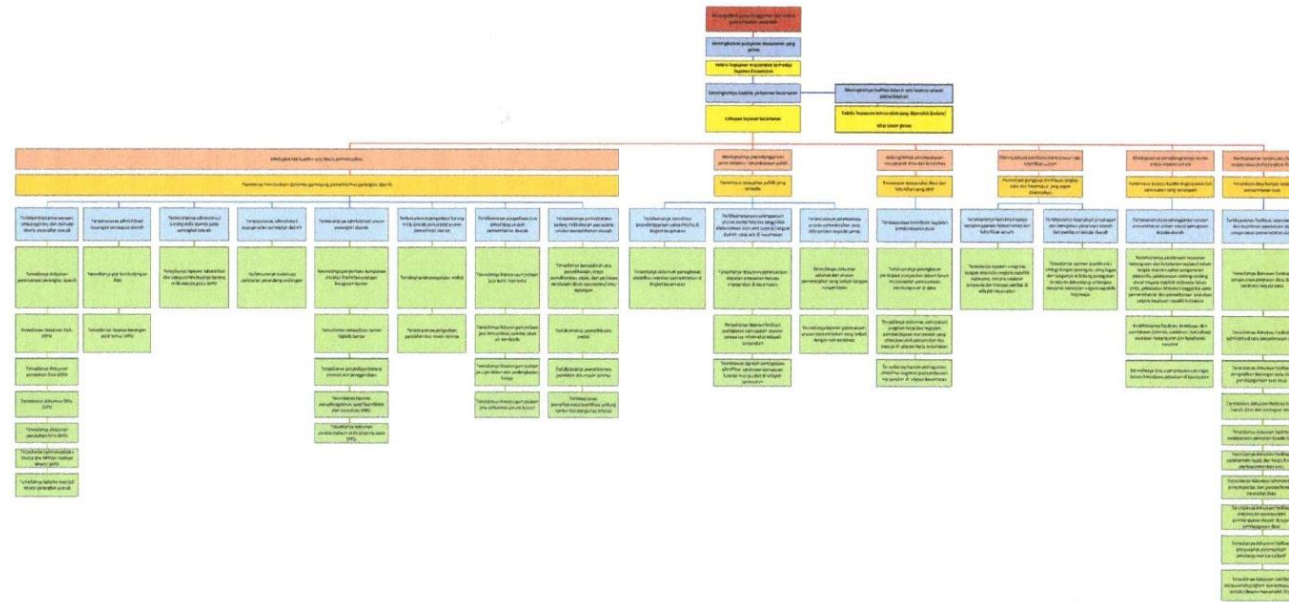
LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT WATUKUMPUL
NOMOR : 900.1.15 / 74 /TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2025 PADA KECAMATAN
WATUKUMPUL.

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KECAMATAN
WATUKUMPUL TAHUN 2025

| NO | JABATAN DALAM INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| 1. | Camat Watukumpul | Ketua | |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Watukumpul | Sekretaris | |
| 3. | Kasubbag Bina Program dan Keuangan pada Kecamatan Watukumpul | Anggota | |
| 4. | Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Watukumpul | Anggota | |
| 5. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Watukumpul | Anggota | |
| 6. | Kepala Seksi dan Ketentraman Ketertiban Umum pada Kecamatan Watukumpul | Anggota | |
| 7. | Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan Watukumpul | Anggota | |
| 8. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Watukumpul | Anggota | |
| 9. | Penelaah Teknis Kebijakan pada Kecamatan Watukumpul | Anggota | Pujiyono, S.M |
| 10. | Pengadministrasi Perkantoran pada Kecamatan Watukumpul | Anggota | Taufik Hidayat, S.M |


PEMERINTAH KABUPATEN
CAMAT WATUKUMPUL
AGUS SYARI NURHADI, S.H
Pembina Tk. I
NIP. 19680813 199903 1 005

Lampiran 8 Pohon Kinerja Kec.Watukumpul Tahun 2025



CAMAT WATUKUMFUL
 AGUS SYARIF NURHADI, S.H.
 Pemimpin TK / I
 NIP. 19880613 199603 1 005

Lampiran 9 Cascading Kec.Watukumpul Tahun 2025

CAMAT WATUKUMPUL
AGUS SWARIF NURHADI, S.H.
Pembina TK. I
NIP. 19680813 199903 1 005

